



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSWORD
2. Jabatan : KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
3. NIK : 433627

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/99 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m²/100 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m²/45 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/42 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah Seluas 113 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 385 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 467.200.000

1. MOBIL, TOYOTA FOURTUNER MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 199.800.000
2. MOBIL, TOYOTA HARTOP STANDART Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 74.800.000
3. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 42.800.000



4. MOBIL, TOYOTA DEFENDER Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp.
149.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.330.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.072.200.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.072.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.